

LAMPIRAN ...

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2026

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PERHUBUNGAN
TAHUN 2026**



DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-3
1.3.1. Maksud.....	1-3
1.3.2. Tujuan	1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	1-3
BAB 2. .. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024.....	2-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-21
2.3.1. Isu strategis.....	2-21
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	2-21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	2-23
2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-36
9.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	2-36
9.1.1 Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan.....	2-36
9.1.2 Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.....	2-39
BAB 3 . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.....	3-1
3.1.1 Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait.....	3-2
3.1.2 Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat	3-2
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	3-3
3.3 Program dan kegiatan Berisikan Penjelasan Mengenai	3-5
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	4-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	4-1
5.PENUTUP	5-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN	2-2
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	26
Tabel 2. 3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2. 4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2. 5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2. 6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2. 7 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2. 8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun	26
Tabel 2. 9 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan	27
Tabel 2. 10 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD	2-39
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretaria Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026	2-13
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun	3-6
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	4-2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026	2-10



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 sebagai tahun kelima dari periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. **Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016. Perda ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Perhubungan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

- 1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan penyamaan persepsi beserta langkah kerja penyusunan Renja PD
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
 - 1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
 - 2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
 - 3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 s.d 2024.
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
 - 1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2026
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
 - 1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang



- dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
- 2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini diserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
 - 1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
 - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
 - 1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 adalah :

- Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
- Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
- menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
- Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja ... Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan



BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup



BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2024 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2024.



Tabel 2. 1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 Dalam Matrik RPJMD Tahun 2025-2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (tahun 2025)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (tahun 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	1
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										Dinas Perhubungan	1
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85				#DIV/0!		0	0	Dinas Perhubungan	1
		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	80				#DIV/0!		0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Jumlah Kebijakan tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1



	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	3	0	0	#DIV/0!		3	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1
	pembayaran gaji dan tunjangan ASN										Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	56	30	30	1	35	121	3	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	1	0	0	#DIV/0!	0	1	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1



2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	84	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	252	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor										Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi										Dinas Perhubungan	1
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	23	13	8	8	1	13	34	1	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75	49	30	30	1	58	137	2	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	35	26	26	1	37	98	7	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500	1578	2	2	1	2	1,582	3	Dinas Perhubungan	1



2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	15	7	7	1	11	33	3	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	498	100	100	1	100	698	7	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	0	0	0	#DIV/0!		0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah										Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	10	4	4	1	5	19	2	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Dinas Perhubungan	1



	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1800	700	300	300	1	400	1,400	1	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	24	12	12	1	12	48	1	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72	26	14	14	1	14	54	1	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Dinas Perhubungan	1
	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan										Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2	0	0	#DIV/0!	1	3	3	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Dinas Perhubungan	1



	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	15	8	8	1	9	32	4	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	270	33	45	45	1	14	92	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	0	0	0	#DIV/0!	1	1	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										Dinas Perhubungan	1
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	V/C Rasio (Rasio)	0.9				#DIV/0!	0	#VALUE!		Dinas Perhubungan	1
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100				#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1



2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Keselamatan dan kelancaran lalu lintas										Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	312	85	50	50	1	24	159	1	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	6	1	0	0	#DIV/0!	0	1	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	312	75	50	50	1	349	474	2	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										Dinas Perhubungan	1
	Tertibnya kendaraan keluar masuk dan parkir										Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C										Dinas Perhubungan	1
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1



2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya pelataran parkir sesuai standar									Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									Dinas Perhubungan	1
	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Peningkatan Keselamatan Transportasi									Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	3100	1600	0	0	#DIV/0!	0	1,600	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	60	18	9	9		1	10	Dinas Perhubungan	1



2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									Dinas Perhubungan	1
	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	6	13	0	0	#DIV/0!	0	13	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									Dinas Perhubungan	1
	Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									Dinas Perhubungan	1
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									Dinas Perhubungan	1
	Kelancaran dan keselamatan jalan									Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									Dinas Perhubungan	1



	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	72	142	6	6	1	12	160	2	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	3	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Masyarakat										Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	3	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1
2.15.02.2.16.0002	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Perhubungan	1



2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Perhubungan	1
	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0		Dinas Perhubungan	1
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											Dinas Perhubungan	1



Capaian Pelaksanaan Sub Kegiatan dan target Indikator Program dan Indikator Kegiatan Selama Tahun 2024

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota.

Output Sub Kegiatan ini adalah pengadaan 20 unit yang terpasang di sepanjang 24,79 Km jalan Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Output Sub Kegiatan ini adalah pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas sebanyak 60 Unit yang berada di sepanjang jalan di Kabupaten Dharmasraya.
 2. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Output Sub Kegiatan ini adalah pemeliharaan 10 Unit alat Uji Kendaraan Bermotor.
 3. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemanuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota.

Output Sub Kegiatan ini adalah pengamanan lalu lintas pada hari-hari besar, acara kunjungan Bupati dan Pengamanan lalu lintas rutin setiap hari.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 31 Orang selama satu tahun anggaran.
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Output kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor pada Dinas Perhubungan sebanyak 11 paket.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada dinas perhubungan sebanyak 3 paket



- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Perhubungan sebanyak 28 macam.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik.
Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor untuk keperluan rapat dan tamu sebanyak 808 kotak.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan.
Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan pengandaan sebanyak 9 paket.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Output Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dinas perhubungan dalam dan luar daerah sebanyak 100 Laporan.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Output Sub Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Speker, PC, Tablet dan Laptop untuk Kelengkapan Dinas Perhubungan sebanyak 4 unit.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat berupa materai sebanyak 400 bh.
 - b. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air berupa pembayaran listrik kantor selama 12 bulan.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa penyediaan honorarium THL dan PPT selama 11 Bulan.
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 9 Unit.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara sebanyak 9 unit.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan



Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Panjang ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan			62	64	65	67	51	24,79	65	67	
2	V/C (volume capactiti Ratio)			0,30	0,40	0,40	0,50	0,22	0,24	0,40	0,50	
3	Jumlah penambahan trayek angkutan umum			0	0	2	3	-	-	2	3	
4	Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR			86,5	88	89	90	62,2	67,8	89	90	
5	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan			A	A	A	A	A	A	A	A	



	Bermotor (UPUBKB)											
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



1. Panjang Ruas Jalan Kabupaten Yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan

Yang dimaksud dengan Panjang Ruas Jalan Kabupaten Yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan adalah jumlah panjang ruas jalan yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Semakin panjang ruas jalan yang terpenuhi suatu Kabupaten maka Kabupaten tersebut semakin baik dikarenakan banyak wilayah Kabupaten tersebut yang memiliki akses jalan serta apabila jalan tersebut sudah dilengkapi dengan perlengkapan jalan maka makin baik Kabupaten tersebut karena jalan tersebut telah memenuhi syarat lalu lintas yaitu selamat, aman, dan nyaman untuk pengguna jalan jika masih kurang atau minimnya fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang maka menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat karena banyaknya ruas jalan, dan daerah yang rawan kecelakaan.

Tabel 2. 3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panjang Ruas Jalan Kabupaten Yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan	Km			22,09	51	24,79
Variabel ...						
Variabel ...						

Sumber : ..., Tahun 2024

Pada ruas jalan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 yang telah terpasang sepanjang 24,79 km dan Pemasangan rambu- rambu sebanyak 20 buah ,namun masih kurang maksimal jumlahnya dikarenakan keterbatasan anggaran,maka dari itu pengusulan pengadaan perlengkapan jalan selalu di usulkan di laporan renja,karna salah satu yang diprioritaskan.

2. V/C (Volume Capaciti Ratio)

V/C Merupakan Perbandingan dari Volume Lalu Lintas dibagi dengan Kapasitas Jalan.Volume Lalu Lintas didapat dari Survey Traffic Counting dengan melakukan pencatatan kendaraan yang melalui jalan tersebut.

Apabila nilai v/c Ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar,maka dapat dikategorikan arus telah mendekati Kapasitas,sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Tabel 2. 4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V/C (Volume Capaciti Ratio)	Volume		0,20	0,24	0,22	0,24



Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Variabel ...						
Variabel ...						

Sumber : ..., Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kemampuan jalan Kabupaten Dharmasraya untuk beberapa tahun lalu hingga saat ini masih pada kondisi yang ramai lancar tanpa memerlukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas karena meskipun Kabupaten Dharmasraya memiliki volume kendaraan yang cukup ramai namun Kabupaten Dharmasraya juga memiliki ruas jalan yang lebar maka Kabupaten Dharmasraya masih dalam kategori yang aman.

3. Jumlah Penambahan Trayek Angkutan Umum

Penambahan Trayek Angkutan Umum adalah Penambahan lintasan kendaraan umum atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.

Jika penambahan trayek angkutan umum terpenuhi dapat meminimalisir orang atau anak-anak yang berkendara pribadi, sekaligus mengurangi kepadatan jalan dan jumlah kasus kecelakaan tunggal dan juga akan menghasilkan pendapatan daerah, dan apabila jumlah penambahan trayek tidak terpenuhi maka akan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi tidak hanya berimbas pada kemacetan, seiring dengan semakin membludaknya jumlah kendaraan pribadi, kecelakaan lalu lintas juga semakin kerap terjadi.

Tabel 2. 5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penambahan Trayek Angkutan Umum	Jumlah	0	0	0	0	0
Variabel ...						
Variabel ...						

Sumber : ..., Tahun 2024

Belum adanya anggaran kegiatan untuk penambahan trayek angkutan umum, dan belum adanya bantuan dari Dana DAK dan mayoritas masyarakat dharmasraya banyak menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga masih tingginya angka kecelakaan di dharmasraya, pelajar dan usia muda paling banyak jadi korbannya

4. Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.

Jumlah Angkutan orang dan barang yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dibagi 100%, Uji kir merupakan serangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur atau menguji kelayakan secara teknis dari kendaraan, apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Kir menjadi aturan dan syarat dari pemerintah untuk semua kendaraan dengan fungsi sebagai alat pengangkutan, baik untuk penumpang atau barang.



Jenis kendaraan yang wajib melakukan uji kir adalah dump truck, mobil pick up, kendaraan khusus seperti pengangkut barang dan truk gandeng, truk tangki, bus, taksi, dan angkutan umum.

Uji Kir menjadi penting karna memiliki tujuan untuk memastikan kendaraan masih berfungsi dengan baik saat digunakan secara teknis di jalan raya, khusus untuk yang membawa angkutan penumpang dan barang, Kir bisa dijadikan salah satu penyebab kendaraan rem blong dan Pemerintah pun sudah dengan tegas mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk melakukan uji kir. jika tidak, akan ada sanksi yang mengiringi.

Tabel 2. 6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persentase	87	65	77,82	62,2	67,8
Variabel ...						
Variabel ...						

Sumber : ..., Tahun 2024

Sudah tercapai dengan kategori nilai cukup berhasil, ketercapaian nilai ini di dukung oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR, Sudah baik dan lengkapnya alat yang ada di unit pengujian kendaraan bermotor, dan Peraturan pemerintah tentang odol seperti salah satunya tinggi karangkeng mobil yang tidak memenuhi syarat.

5. Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Proses Pemeberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan dan pengujian. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.

Tabel 2. 7 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Akreditasi	B	B	B	A	A
Variabel ...						
Variabel ...						



Sumber : ..., Tahun 2024

Akreditasi sudah berubah menjadi A sesuai dengan nilai akreditasi pada target perjanjian kinerja 2023 yaitu A. Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksanaan berkala kendaraan bermotor A harus memenuhi persyaratan berupa kelengkapan alat pengujian. Jumlah alat dan syarat yang harus lengkap 10 macam.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu strategis

- A. Masih rendahnya anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan, hal ini tidak sebanding dengan luas dan besarnya kewajiban Dinas Perhubungan dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan yang memadai.
- B. Tingginya tingkat kecelakaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi, fasilitas jalan, kurang ketatnya hukum dan kelaikan kendaraan. Tentu hal ini harus segera diatasi dengan cara semakin ketat dalam melakukan pengujian KIR, perluas kawasan tertib lingkungan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kebanyakan yang mengalami kecelakaan adalah usia muda dan produktif.
- C. Belum Adanya Transportasi Publik Yang Memadai.
- D. Masih Kurangnya pembangunan terminal, pengadaan parkir, dan marka jalan secara merata sesuai kebutuhan di beberapa wilayah, untuk menunjang kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- E. Perencanaan dari penerapan BLUD pada UPTD PKB Dinas Perhubungan terdapat beberapa isu strategis yang mencakup:
 - 1. Pendapatan dari BLUD tidak mencukupi biaya operasional
 - 2. Kurang memadainya kompetensi SDM pegawai BLUD
 - 3. Masih rendahnya komitmen pemerintahan daerah dalam pelaksanaan BLUD

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

- 1. Masih tingginya Angka kecelakaan lalu lintas di Kab. Dharmasraya yang diakibatkan oleh:



2. Tingginya beban lalu lintas jalan sebagai kontribusi dari tingginya penggunaan kendaraan, karena sangat banyak daerah yang kondisinya rawan kecelakaan di daerah Kab. Dharmasraya.
3. Banyaknya daerah rawan kecelakaan akibat tingkat kerusakan jalan yang tinggi karena operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan.
4. Belum maksimalnya tenaga SDM dengan lulusan khusus perhubungan dan pelatihan secara merata dalam pelaksanaan pengawasan lalin,
5. Masih kurangnya kelengkapan pemasangan perlengkapan jalan karena ketersediaan anggaran untuk penunjang fasilitas pendukung perhubungan dan pembangunan terminal, parkir untuk ketertiban lalu lintas.
6. Masih kurangnya kesadaran pengguna kendaraan yang melakukan pengujian kelayakan, selain itu
7. Masih kurangnya konektivitas antar wilayah karena belum menyeluruhnya pembangunan terminal sesuai kebutuhan, mobil angkutan penumpang dan dermaga penyeberangan sungai.
8. Masih Kurangnya fasilitas prasarana keselamatan yang dipasang sesuai kebutuhan antara lain diakibatkan oleh:
 - a. Kurangnya anggaran penunjang prasarana dan fasilitas keselamatan sesuai kebutuhan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi antar wilayah sesuai kebutuhan dengan dinas perhubungan
 - c. Belum adanya anggaran untuk peningkatan fasilitas terminal dan penyeberangan untuk peningkatan konektivitas ke antar wilayah
9. Masih banyaknya mobil dan angkutan yang belum melakukan pengujian kendaraan bermotor
 - a. Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan untuk melakukan pengujian.
 - b. Belum sempurnanya informasi dan fasilitas pengujian yang menarik pengguna kendaraan untuk melakukan pengujian.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel 2. 8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERHUBUNGAN				21.704.779.438					13.257.287.267	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.738.468.740	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.370.002.845	



1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33 Orang/bulan	3.439.079.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33 Orang/bulan	3.349.702.150	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah										



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1.249.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71 Paket	30.010.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	7.420.000	



	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	1.863.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	3.700.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	30.000.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	12.500.000	



			kan								
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dhar masr aya, Pula u Punj ung	Jumlah Lapora n Penyele nggara an Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	100 Lapora n	75.001.100	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Dharmasr aya,Pulau Punjung	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.007.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										



	Pengadaan Mebel	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab.Dharmasraya,Pulau Punjung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Dharmasraya,Pulau Punjung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Dhar masr aya, Pula u Punj ung	<i>Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyura t</i>	400 Lapora n	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Dharmasr aya,Pulau Punjung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	200 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dhar masr aya, Pula u Punj ung	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia kan	24 Lapora n	63.400.890	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Dharmasr aya,Pulau Punjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	48.002.295	



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	14 Laporan	2.730.813.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Dharmasraya,Pulau Punjung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	14 Laporan	2.649.592.200	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan</i>	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab.Dharmasraya,Pulau Punjung	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan</i>	1 Unit	30.721.600	



	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>an Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Pajaknya</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	236.003.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Dharmasraya,Pulau Punjung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	190.935.600	



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	7.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	22.310.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	0	0	



	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				14.966.310.6 98					6.887.284.4 22	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perleng kapan Jalan di Jalan Kabupa ten/Kot a yang Tersedi a	451 Unit	249.989.578	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a yang Tersedia	451 Unit	474.666.83 2	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perleng kapan Jalan yang Tereha bilitasi	210 Unit	14.414.616.1 20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	210 Unit	6.040.338.5 90	



			dan Terpe- li- hara								
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	201.631.750	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	100.000.000	



3	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	100.073.250	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	272.279.000	



2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

9.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

9.1.1 Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2. 9 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	lampu jalan	Ranah Palabi, Kab. Dharmasraya	Ranah Palabi	Timpeh				
2	lampu jalan	jorong sungai pinang, jorong koto tengah dan jorong sungai bulian, Kab. Dharmasraya	Timpeh	Timpeh				



3	lampu jalan	Jr. Trimulya III, Kab. Dharmasraya	Panyubarangan	Timpeh				
4	lampu jalan	Jorong Koto Lamo Jorong Titian Akau	Padang Laweh	Padang Laweh				
5	usulan lain-lain	Jorong Koto Lamo Jorong Titian Akau Nagari Padang Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, Kab. Dharmasraya	Padang Laweh	Padang Laweh				
6	usulan lain-lain	jorong taman sari, Kab. Dharmasraya	Sungai Duo	Sitiung				
7	lampu jalan	Jr Kampung Baru, Kab. Dharmasraya	Koto Padang	Koto Baru				
8	usulan lain-lain	Nagari Kurnia Selatan, Kab. Dharmasraya	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai				
9	usulan lain-lain	Jorong Tanjung Batuang,	Koto Tinggi	Koto Bersar				



		Kab. Dharmasraya						
10	lampu jalan	Alahan nan tigo, Kab. Dharmasraya	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan				
11	usulan lain-lain	Jorong siguntur II dan Jorong Siluluk, Kab. Dharmasraya	Siguntur	Sitiung				
12	Lampu Jalan	jorong pasa pagi , Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai				
13	Lampu Jalan	Jorong Silombik, Kab. Dharmasraya	Koto Nan Empat dibawah	Sembilan Koto				
14	Usulan Lain-lain	JORONG PASAR BARU, Kab. Dharmasraya	Ampalu	Koto Salak				
15	Usulan Lain-lain	NAGARI AMPALU, Kab. Dharmasraya	Ampalu	Koto Salak				



16	Lampu Jalan	alahan nan tigo, Kab. Dharmasraya	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan				
17	Lampu Jalan	ulak banjir, Kab. Dharmasraya	Abai Siat	Koto Besar				

Narasi ...

9.1.2 Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2. 10 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lampu Jalan	Padang Laweh	Padang Laweh	Padang Laweh		1 Paket		
2	Lampu Jalan	sitiung	sitiung	Sitiung		1 Paket		
3	Lampu Jalan	Siguntur	Siguntur	Sitiung		1 Paket		
4	Lampu Jalan	marga jaya	Taratak Tinggi			1 Paket		
5	PENERANGAN LAMPU JALAN LINGKAR	SIDO MULYO	Tebing Tinggi	Pulau Punjung		1 Paket		
6	Tiang Listrik	Koto Mudik	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai		20 Unit		
7	Lampu Jalan Taman	Ranah Baru				1 Paket		

Narasi ...



BAB 3 . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi mandat oleh Undang-undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan selalu dituntut meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien.

Target utama Pembangunan Perhubungan Republik Indonesia adalah memacu serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Untuk meningkatkan kesempatan kerja kebijakan nasional tersebut perlu didukung dengan adanya program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Adapun arah kebijakan sektor perhubungan adalah agar terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan mengutamakan keselamatan sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi masyarakat adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut:

1. Menciptakan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah.
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran kecelakaan dan muatan lebih.



3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi dan efesiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas.
4. Penyediaan ruang/ lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/ kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas yang ada).
5. Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan, seperti pasar, pusat perdagangan dll.
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam bidang perhubungan.

3.1.1 Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya

3.1.2 Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Badan/Dinas terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan/ berlokasi di Kabupaten Dharmasraya dapat .



3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Misi RPJMD : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian

Bidang Urusan : Dinas Perhubungan

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretaria Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
			2022	2023	2024	2025	2026	xxx
Tujuan Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi								
Jumlah kecelakaan lalu lintas	...	...	...	...	...	...	...	...
Indikator Tujuan ...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sasaran Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi								
Panjang ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Km	...	22.09	51	24,79	65	67	...
V/C (volume capacti Ratio)	Volume	...	0,24	0,22	0,24	0,40	0,50	...
Jumlah penambahan trayek angkutan umum	Jumlah	...	-	-	-	2	3	...



Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	%	...	77,82	62,2	67,8	89	90	...
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Akreditasi	...	B	A	A	A	A	...



3.3 Program dan kegiatan Berisikan Penjelasan Mengenai

Berdasarkan analisa kebutuhan, Dinas Perhubungan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kesehatan. Output yang dihasilkan dari sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah di Tahun 2026 sebagai berikut :



Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERHUBUNGAN				21.704.779.438				23.875.257.382
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.738.468.740				7.412.315.614
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab.Dharmasraya,Pulau Punjung	33 Orang/bulan	3.439.079.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Orang/bulan	3.782.986.900



2	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	20 Paket	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	5.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	71 Paket	30.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71 Paket	33.011.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	40 Paket	7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Paket	8.250.000



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	2 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	16.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	11 Paket	30.000.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Paket	33.000.220
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	100 Laporan	75.001.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	82.501.210
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	10 Unit	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	27.500.000



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	5 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	33.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	400 Laporan	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Laporan	4.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	24 Laporan	63.400.890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	69.740.979
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	14 Laporan	2.730.813.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	3.003.895.180



5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	1 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	22.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	9 Unit	236.003.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	259.604.125



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	45 Unit	7.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Unit	8.426.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Dharmasraya, Pulau Punjung	1 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	22.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				14.966.310.698				16.462.941.768
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								



	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		451 Unit	249.989.578	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		451 Unit	274.988.536
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		210 Unit	14.414.616.12 0	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		210 Unit	15.856.077.732
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		10 Unit	201.631.750	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	221.794.925



3	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		12 Laporan	100.073.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	110.080.575



BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi hingga 2024 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, maka proyeksi tahun 2026 adalah sebagai berikut :



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2026

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						21.704.779.438,00							23.875.257.382,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.704.779.438,00							23.875.257.382,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						21.704.779.438,00							23.875.257.382,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.738.468.740,00						-	7.412.315.614,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.439.079.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	3.782.986.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.439.079.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		3.782.986.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	162.511.300,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	178.762.430,00	DINAS PERHUBUNGAN



	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				71 Paket	30.010.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		33.011.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		8.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		16.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														



			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	30.000.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		33.000.220,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	75.001.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		82.501.210,00	DINAS PERHUBUNGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.798.214.690,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	3.078.036.159,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				400 Laporan	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				24 Laporan	63.400.890,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		69.740.979,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				14 Laporan	2.730.813.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		3.003.895.180,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.663.750,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	312.030.125,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	236.003.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		259.604.125,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	7.660.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		8.426.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	14.966.310.698,00						-	16.462.941.768,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	14.664.605.698,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	16.131.066.268,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				451 Unit	249.989.578,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		274.988.536,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														



			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				210 Unit	14.414.616.120,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PBJT-KO NSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		15.856.077.732,00	DINAS PERHUBUNGAN
--	--	--	---	--	--	--	----------	-------------------	---	--	---	---	---	--	-------------------	-------------------



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	201.631.750,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	221.794.925,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	201.631.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		221.794.925,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	100.073.250,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	110.080.575,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	100.073.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		110.080.575,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							21.704.779.438,00							23.875.257.382,00	



4.2 Target Kinerja Tahun 2026

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2023	2024	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panjang ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Km	51	24,7	65	67	65	67
2	V/C (volume capaciti Ratio)	Volume	0,22	0,24	0,40	0,50	0,40	0,50
3	Jumlah penambahan trayek angkutan umum	Jumlah	0	0	2	3	2	3
4	Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persen	62,2	67,8	89	90	67,8	90
5	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Akreditasi	A	A	A	A	A	A



5. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dapat terlaksana seoptimal mungkin apabila semua aparatur dan stake holder terkait berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2026 menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kepala Dinas

CATUR EBYANDRI M., S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19770121 199511 1 003

